

# Kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam Memperkuat Armada Maritim (661-680 M)

Iin Isnaini<sup>1</sup>, Halid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[iin\\_isnaini\\_23@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:iin_isnaini_23@mhs.uinjkt.ac.id)<sup>1</sup>, [halid@uinjkt.ac.id](mailto:halid@uinjkt.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrack

*This article aims to analyze the policy of Muawiyah bin Abu Sufyan in strengthening the naval fleet during his reign from 661 to 680 CE. The central issue addressed is how Muawiyah's military policies contributed to the stability and expansion of the Islamic caliphate amidst the threat from the Byzantine Empire, which dominated the Mediterranean Sea. To address this issue, the study employs a historical methodology with a qualitative descriptive approach, relying on primary and secondary sources, including works by classical historians. The research findings indicate that Muawiyah implemented various strategies, including the development of port infrastructure, the recruitment of Byzantine architects and technicians, and the training of Arab sailors. These policies not only strengthened coastal defenses but also facilitated effective counterattacks against enemies. Furthermore, the established naval fleet served as a tool for expanding Islamic influence and maintaining political stability domestically. The conclusion of this study emphasizes that Muawiyah's policy in strengthening the naval fleet had long-term impacts on the social, political, and economic structure of the Islamic world. The innovations and strategies employed by Muawiyah not only expanded the caliphate's territories but also created a solid foundation for the continuity of the Umayyad Dynasty.*

*Keywords: Muawiyah bin Abu Sufyan, The policy, Naval Fleet.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam memperkuat armada maritim selama masa pemerintahannya dari tahun 661 hingga 680 M. Inti masalah yang diangkat adalah bagaimana kebijakan militer Muawiyah berkontribusi terhadap stabilitas dan ekspansi kekhalifahan Islam di tengah ancaman dari Kekaisaran Bizantium yang dominan di Laut Mediterania. Untuk menyelesaikan masalah ini, penelitian ini menggunakan metodologi historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengandalkan sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk karya-karya sejarawan klasik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Muawiyah mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, perekrutan arsitek dan teknisi Bizantium, serta pelatihan pelaut Arab. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat pertahanan pesisir, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan serangan balasan yang efektif terhadap musuh. Selain itu, armada maritim yang dibangun berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengaruh Islam dan menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan Muawiyah dalam memperkuat armada maritim memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi di dunia Islam. Inovasi dan strategi yang diterapkan oleh Muawiyah tidak hanya memperluas wilayah kekhalifahan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan Dinasti Umayyad.

Kata Kunci: Muawiyah bin Abu Sufyan, Kebijakan, Armada Maritim.

## **Pendahuluan/Introduction**

Dinasti Umayyah, yang berdiri pada tahun 661 M, menandai era baru dalam sejarah Islam dengan perpindahan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus, sebuah langkah yang mencerminkan perubahan signifikan dalam orientasi politik dan administrasi kekhalifahan (Al-Dzahabi, 1989). Muawiyah bin Abu Sufyan memegang peran penting dalam mengubah struktur pemerintahan Islam dari sistem khilafah berbasis pemilihan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi monarki hereditas, di mana kekuasaan diwariskan melalui garis keturunan (Nashiruddin, 2020). Langkah ini membawa perubahan besar dalam tata kelola politik Islam dan memengaruhi perkembangan sejarah Islam selanjutnya. Di bawah pemerintahan Muawiyah, kekhalifahan Islam mengalami ekspansi luas, meliputi bagian Asia Kecil, Afrika Utara, dan wilayah Mediterania.

Pengalaman Muawiyah sebagai gubernur Suriah di bawah Khalifah Umar dan Utsman memberinya wawasan penting dalam strategi militer dan pengelolaan wilayah strategis. Menghadapi ancaman Bizantium dan menjaga stabilitas internal Suriah mengasah keterampilannya, yang kemudian menjadi dasar utama bagi kebijakan-kebijakan militer dan politiknya saat menjadi khalifah pertama Dinasti Umayyah (Hawting, G. R, 2000). Muawiyah dikenal akan kecakapan diplomatiknya, yang penting untuk menyatukan berbagai faksi di tengah tantangan internal dan eksternal. Melalui kompromi dan negosiasi cerdas, ia berhasil merekonsiliasi suku-suku Arab dan kelompok politik di wilayah kekhalifahan, menjaga stabilitas pemerintahannya di tengah beragam tantangan.

Masa pemerintahan Muawiyah (661-680 M), kekhalifahan Islam mengalami ekspansi besar, dengan wilayah yang membentang dari Atlantik di barat hingga perbatasan India di timur. Ekspansi ini meliputi Afrika Utara, Asia Tengah, dan wilayah pesisir Mediterania, memperluas kekuasaan Islam di kawasan strategis yang penting bagi perdagangan dan pertahanan (Malik, 2017). Pencapaian ini bukan hanya mencerminkan kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga menggambarkan keahlian Muawiyah dalam mengelola kebijakan strategis untuk konsolidasi kekuasaan dan perluasan pengaruh politik serta agama Islam di dunia yang semakin luas.

Ekspansi Muawiyah dimulai dengan penaklukan Afrika Utara, kawasan penting yang sebelumnya dikuasai Bizantium dan kekuatan lokal. Melalui kampanye militer yang strategis, ia berhasil menguasai wilayah Maghrib (Tunisia modern), area vital dalam jalur perdagangan Mediterania. Dengan mengamankan Afrika Utara, Muawiyah mengurangi pengaruh Bizantium dan meletakkan fondasi bagi ekspansi ke Spanyol (Andalusia) yang terjadi kemudian (Watt, 1968).

Muawiyah mengarahkan ekspansi ke wilayah timur, khususnya Persia dan Asia Tengah, yang kaya akan sumber daya dan strategis karena menghubungkan kekhalifahan dengan Jalur Sutra. Melalui ekspedisi militer, ia berhasil menguasai Khurasan, yang menjadi pusat militer dan administratif penting bagi Dinasti Umayyah. Dengan menaklukkan wilayah ini, Muawiyah memperkuat kekhalifahan dari ancaman eksternal dan meningkatkan perekonomian dengan akses ke jalur

perdagangan antara Asia dan dunia Islam (Nur, 2015).

Keberhasilan ekspansi teritorial Muawiyah tidak hanya didorong oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kebijakan administrasi yang efektif. Ia menunjuk gubernur untuk mengelola wilayah baru dan memastikan kesetiaan terhadap kekhalifahan. Muawiyah juga menggunakan diplomasi dengan bijak untuk meredam konflik, baik dengan Bizantium maupun faksi internal. Kebijakan ini menjaga stabilitas dan mencegah pemberontakan besar selama pemerintahannya (Tahyub, 2004).

Ekspansi teritorial Muawiyah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola keragaman etnis dan agama di wilayah yang baru ditaklukkan. Ia menerapkan kebijakan fleksibel dengan memberi kebebasan beragama kepada komunitas non-Muslim, seperti suku Arab, Persia, dan komunitas Kristen serta Yahudi, dengan syarat mereka membayar jizyah. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas sosial dan integrasi wilayah yang beragam (Tiqtaqa, 1895). Kebijakan ini tidak hanya menciptakan stabilitas politik di wilayah yang baru dikuasai, tetapi juga mendorong integrasi ekonomi yang memperkuat perekonomian kekhalifahan secara keseluruhan.

Pentingnya strategi militer dalam era Muawiyah tidak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik saat itu. Kekhalifahan Islam menghadapi ancaman dari Kekaisaran Bizantium di utara dan barat, serta Kekaisaran Persia di timur. Kebijakan militer Muawiyah tidak hanya ditujukan untuk ekspansi, tetapi juga untuk mempertahankan wilayah yang telah dikuasai dari ancaman eksternal (Kaegi, W. E, 1992). Selain itu, Muawiyah juga

menghadapi tantangan internal dalam bentuk pemberontakan dan ketidakpuasan di berbagai wilayah kekhalifahan. Strategi militernya juga mencakup penanganan konflik internal ini, yang memerlukan pendekatan yang lebih halus dan diplomatik selain kekuatan militer (Crone, P., & Hinds, M, 1986).

Kebijakan militer Muawiyah bin Abu Sufyan memainkan peran penting dalam membentuk ulang struktur sosial dan ekonomi kekhalifahan, terutama melalui reformasi signifikan seperti pembentukan pasukan reguler dan penerapan sistem penggajian tentara (*jund*) (Supriyadi, 2008). Sebelum pemerintahan Muawiyah, kekuatan militer Islam lebih bergantung pada pasukan sukarelawan yang kurang terorganisir. Namun, dengan pembentukan pasukan reguler yang digaji, Muawiyah menciptakan kekuatan militer yang lebih stabil dan loyal pada negara, bukan pada kesukuan atau individu tertentu. Hal ini juga memunculkan kelas militer profesional yang memperoleh status sosial tinggi dan gaji tetap, yang memperkuat kedudukan mereka dalam masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada rampasan perang atau patronase kesukuan (Supriyadi, 2008).

Meningkatnya jumlah prajurit profesional, muncul kelas baru yang terdiri dari tentara yang digaji dan keluarganya, yang memiliki ikatan kuat dengan negara. Kelas ini termasuk prajurit, administrator, dan pejabat militer yang bertindak sebagai penghubung antara kekhalifahan dan pasukan. Mereka ditempatkan di garnisun-garnisun strategis di wilayah seperti Syam, Mesir, dan Irak, yang memperkuat struktur sosial lokal dan meningkatkan interaksi

antara tentara dan masyarakat setempat. (Amin, 2019).

Kebijakan militer Muawiyah berdampak besar pada ekonomi kekhalifahan, memaksa alokasi dana yang lebih besar untuk sektor militer. Selain untuk gaji prajurit, dana digunakan untuk perlengkapan militer, pembangunan benteng, dan logistik. Sumber utama pendanaan berasal dari pajak domestik, jizyah, dan upeti dari wilayah taklukan, yang mengubah prioritas ekonomi dari proyek sipil menjadi kebutuhan militer. Ketergantungan pada pendapatan dari ekspansi dan kestabilan wilayah taklukan semakin meningkat untuk menopang anggaran kekhalifahan dalam jangka panjang (Nur, 2015).

Sistem penggajian tentara Muawiyah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan terhadap produksi senjata dan perlengkapan militer, yang mengembangkan industri terkait. Keberadaan garnisun permanen di wilayah strategis menjadikan kota-kota perbatasan sebagai pusat aktivitas ekonomi, dengan tentara sebagai konsumen utama. Hal ini mengubah kota-kota yang sebelumnya kurang berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih dinamis, meningkatkan ekonomi lokal secara signifikan (Rahmadi P, 2018). Konsentrasi sumber daya untuk militer di masa Muawiyah mengurangi anggaran untuk infrastruktur sipil dan layanan masyarakat, menciptakan ketegangan dalam pengelolaan anggaran. Wilayah yang kurang terkait dengan strategi militer sering kali terabaikan, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat (Hoyland, R. G, 2015).

Penelitian ini mengisi celah dalam kajian sejarah Islam awal, khususnya

terkait peran strategis Muawiyah bin Abu Sufyan dalam pengembangan kekuatan maritim Islam yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dibanding aspek politik atau konflik internal pada masa Dinasti Umayyah. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menyoroti legitimasi kekuasaan Muawiyah atau konflik dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sementara dimensi kebijakan militernya dalam membangun angkatan laut belum banyak dianalisis secara mendalam dan kontekstual. Padahal, kebijakan maritim ini memiliki dampak strategis terhadap stabilitas, ekspansi wilayah, dan pengaruh ekonomi kekhalifahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana visi militer dan diplomasi maritim Muawiyah berkontribusi pada transformasi strategi militer Islam, sekaligus memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kekuatan laut digunakan sebagai alat integrasi kekuasaan dan pengamanan wilayah dalam sejarah awal Islam.

### Metode Penelitian

Metode historis sangat tepat digunakan dalam tulisan ini karena memungkinkan peneliti merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kronologis dan analitis sebagaimana dijelaskan Tosh (Tosh, J., 2015). Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, sumber data penelitian ini menggunakan teks-teks klasik seperti *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* karya Ibnu Jarir At-Tabari, *Mawsū'ah al-Tārīkh al-Islāmī: 'Aṣr al-Umawī* karya Salah Tahyub, *Sirah al-Nabawiyah li Ibnī Hisyam* karya Ibn Hisyam, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* karya Ibnu Katsir, *Ṭarīkh Khalīfah ibn Khayyāt* karya Khayyat, dan teks klasik pendukung yang terkait.

Metode ini juga memfasilitasi kritik sumber untuk menilai keakuratan riwayat dan konteksnya. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif yang terintegrasi dalam metode ini, seperti yang diuraikan oleh Creswell & Poth, memungkinkan analisis tematik dan kontekstual terhadap dinamika kekuasaan, diplomasi, dan militer. Oleh karena itu, metode historis tidak hanya relevan untuk menggambarkan kebijakan Muawiyah, tetapi juga penting dalam menjelaskan mengapa strategi tersebut diambil dalam kondisi sosial-politik tertentu serta dampaknya terhadap stabilitas kekhalifahan. (Creswell, J. W, 2018).

### **Pembahasan (Discussion)**

#### **Latar Belakang Muawiyah bin Abu Sufyan**

Mu'awiyah bin Abu Sufyan merupakan salah satu tokoh penting dan berpengaruh dalam sejarah Islam, terutama dalam peranannya sebagai pendiri Dinasti Umayyah. Ia dilahirkan sekitar dua tahun sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW, meskipun beberapa riwayat lain menyebutkan bahwa ia lahir empat tahun sebelum Nabi Muhammad mulai menjalankan misi dakwahnya di Makkah (Tiqtaqa, 1895). Muawiyah lahir dalam keluarga bangsawan Quraisy di tengah perubahan besar dengan datangnya Islam ke jazirah Arab.

Ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, adalah pemimpin Quraisy yang berpengaruh dan awalnya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, karena ingin mempertahankan struktur sosial dan ekonomi tradisional Makkah. Namun, menjelang penaklukan Makkah, Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam, yang kemudian membuka jalan bagi keterlibatan keluarga Muawiyah dalam

perkembangan Islam di masa berikutnya. (Hitti, 1951). Ibunya, Hindun binti Utbah, adalah sosok berpengaruh dalam masyarakat Quraisy, dikenal karena status sosialnya dan keberaniannya, terutama dalam perannya di Perang Uhud sebagai pendukung kuat Quraisy. Kualitas keberanian dan tekadnya ini tampaknya menurun kepada Muawiyah, yang kelak menjadi tokoh berpengaruh dalam politik dan militer Islam (Hitti, 1951).

Muawiyah tumbuh dalam keluarga berpengaruh yang membentuknya menjadi ahli politik dan strategi. Kombinasi status bangsawan, kepemimpinan ayahnya, dan pengaruh kuat ibunya menjadikannya tokoh penting dalam pemerintahan Islam, baik saat ia memeluk Islam dan berperan di bawah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maupun sebagai khalifah pertama Dinasti Umayyah (Musthafa, 2021). Sejak usia muda, Mu'awiyah menunjukkan ketertarikan terhadap ajaran Islam. Ia memeluk Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad, meskipun ada perdebatan mengenai waktu pastinya (Hisyam, 2009).

Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, Mu'awiyah terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk periode pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Talib (Sodiqin, 2018). Sebagai gubernur Syam, Muawiyah berkonflik dengan Khalifah Ali bin Abu Thalib dalam Pertempuran Shiffin (657 M) untuk memperebutkan kekuasaan. Ia menolak legitimasi Ali, menuntut agar para pelaku pembunuhan Utsman diadili terlebih dahulu. Konflik ini berakhir dengan kesepakatan arbitrase, tetapi ketegangan tetap ada. Muawiyah menunjukkan ketegasan dan ambisinya dalam menegakkan stabilitas dan otoritas Islam,

bahkan jika itu berarti berseberangan dengan khalifah yang sah (Hamzah & Hamriana, 2022).

Terbunuhnya Khalifah Ali pada 661 M, Muawiyah mengambil alih kekuasaan sebagai khalifah pertama Dinasti Umayyah, memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus dan memulai era baru dalam sejarah Islam dengan berdirinya Kekhalifahan Umayyah (At-Tabari, n.d.). Di bawah kepemimpinannya, Muawiyah melakukan reformasi administratif dan militer yang memperkuat struktur kekhalifahan serta memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara dan wilayah sekitar. Sebagai pemimpin yang cerdas dan pragmatis, ia mengonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat pengaruh Islam melalui kebijakan yang stabil dan strategis (Ibn Katsir, 1998).

Muawiyah bin Abu Sufyan dikenal dikelilingi oleh sejumlah tokoh cendekia dan pemimpin strategis yang memengaruhi, memperkaya, serta memperkuat cara kepemimpinannya. Amr bin Ash mendukungnya dalam diplomasi dan aliansi politik, Ubaidullah bin Ziyad mencontohkan ketegasan dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan, sementara Hajjaj bin Yusuf memperlihatkan pendekatan yang tegas namun efektif dalam menanggapi pemberontakan. Selain itu, Mughirah bin Syu'bah memberikan wawasan mengenai diplomasi dengan suku-suku besar melalui kebijakan patronase. Tokoh-tokoh ini berperan penting dalam membentuk Muawiyah sebagai pemimpin yang mampu menyeimbangkan diplomasi dan kekuatan, fleksibilitas, serta inovasi dalam pemerintahan (Crone, P., & Hinds, M, 1986; Hawting, G. R, 2000; Kennedy, H, 2004).

Muawiyah menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga Nabi dan para sahabat, termasuk menghormati kedudukan Hasan bin Ali dan tokoh sahabat lainnya. Meskipun terjadi konflik, ia tetap berupaya mempertahankan persatuan umat Islam (Ekaviana, 2021). Setelah wafat pada 680 M, kekhalifahan Umayyah dilanjutkan oleh putranya, Yazid, menandai awal dari suksesi dinasti di kekhalifahan (Rachman, 2018). Meskipun warisannya sering diperdebatkan, peran Mu'awiyah dalam sejarah Islam tidak dapat dipungkiri. Ia adalah sosok yang berkontribusi besar dalam pembentukan struktur pemerintahan Islam dan pengembangan wilayah kekuasaan Islam pada masa awal.

### **Strategi Militer Muawiyah bin Abu Sufyan**

Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Dinasti Umayyah, merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal karena kepiawaiannya sebagai ahli strategi militer dan politik. Selama dua dekade memimpin wilayah Syam, ia berhasil memperkuat kekuasaan Bani Umayyah berkat kemampuan manuver politiknya yang cerdas. Lahir dalam keluarga bangsawan Quraisy, ia tumbuh di lingkungan politik yang kompleks, membentuknya menjadi pemimpin yang mampu memanfaatkan situasi dengan cermat untuk mencapai stabilitas kekuasaan (Tahyub, 2004).

Muawiyah bin Abu Sufyan menonjol karena kemampuannya dalam merancang dan menerapkan strategi militer yang inovatif. Selama pemerintahannya, ia menghadapi tantangan besar, baik dari konflik internal umat Islam maupun ancaman eksternal dari Bizantium dan kekuatan asing. Dengan kepemimpinan yang visioner dan

pendekatan pragmatis, Muawiyah tidak hanya mempertahankan stabilitas wilayahnya, tetapi juga memperluas kekuasaan Islam. Keahliannya dalam menggabungkan kekuatan militer dengan diplomasi memungkinkan Muawiyah merangkul pihak-pihak yang sebelumnya dianggap ancaman, menjadikannya sekutu strategis. Pendekatan ini mencerminkan peranannya sebagai seorang jenderal yang ulung sekaligus negarawan yang mampu mengintegrasikan aspek sosial-politik untuk memperkuat kekhalifahan. (Tahyub, 2004).

Berberapa pembaharuan penting yang dilakukan Muawiyah dalam strategi militer Islam, termasuk pembentukan armada laut yang kuat, yang memungkinkan umat Islam untuk pertama kalinya mengarungi dan menguasai wilayah laut Mediterania. Sebelum masa Muawiyah, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa daratan yang lebih mengandalkan kekuatan kavaleri dan infanteri dalam pertempuran (Hitti, 1951). Namun, Muawiyah melihat potensi besar dalam penguasaan laut sebagai jalur ekspansi dan pertahanan, terutama dalam menghadapi Kekaisaran Bizantium yang mendominasi wilayah tersebut. Langkah ini menunjukkan visi strategis Muawiyah yang luar biasa dalam memanfaatkan kekuatan maritim untuk memperluas wilayah kekhalifahan sekaligus mempertahankan perbatasannya (Nur, 2015).

Strategi militer Muawiyah di darat dikenal karena keseimbangan yang cermat antara pendekatan defensif dan ofensif. Ia membangun benteng-benteng pertahanan yang kuat di perbatasan untuk melindungi wilayah yang telah dikuasai, sekaligus mengamankan kekhalifahan dari ancaman

eksternal. Di sisi lain, Muawiyah terus melakukan ekspansi melalui kampanye militer yang terencana ke Armenia, Afrika Utara, dan Asia Kecil, memperluas pengaruh Islam di kawasan-kawasan strategis. Keberhasilannya tidak hanya didorong oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh diplomasi cerdas dan aliansi strategis dengan suku-suku Arab yang setia, yang semakin memperkuat posisi politik dan militer Dinasti Umayyah (Nashiruddin, 2020).

Muawiyah mengadopsi pendekatan politik-militer yang pragmatis selama pemerintahannya sebagai khalifah, lebih memilih diplomasi untuk menyelesaikan konflik daripada konfrontasi fisik. Namun, ketika dibutuhkan, ia menggunakan kekuatan militer secara efektif dan terencana. Strategi militernya yang melibatkan perhitungan matang, inovasi dalam perang laut, dan diplomasi yang cerdas menjadikannya sebagai salah satu pemimpin militer paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Warisan kepemimpinannya bertahan dalam bentuk Dinasti Umayyah yang memerintah selama beberapa dekade setelah kematiannya.

#### 1. Penguatan Angkatan Laut

Kebijakan militer utama Muawiyah adalah pengembangan angkatan laut Dinasti Umayyah, yang merubah pendekatan strategis Islam. Sebelumnya, fokus militer Islam lebih pada pertempuran darat, sementara angkatan laut belum menjadi prioritas. Namun, Muawiyah menyadari pentingnya kekuatan maritim untuk menghadapi ancaman, terutama dari Kekaisaran Bizantium, yang memiliki dominasi laut di Mediterania. Untuk itu, ia

membangun angkatan laut yang kuat, yang memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh Islam di wilayah pesisir dan dalam melawan ancaman Bizantium (Thaqussy, 2010). Kekaisaran Bizantium, dengan armada lautnya yang kuat, tidak hanya menguasai wilayah pesisir Mediterania, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi stabilitas kekuasaan Islam di wilayah-wilayah pesisir seperti Syam dan Mesir (Luttwak, E. N., 2009).

Dalam upaya memperkuat armada maritim, Muawiyah bin Abu Sufyan menjalankan strategi dan taktik cermat untuk membangun kekuatan angkatan laut yang tangguh dan efektif, menandai titik penting dalam sejarah militer Islam. Sebagai gubernur Suriah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah menyaksikan langsung potensi dan ancaman dari Kekaisaran Bizantium yang menguasai Laut Mediterania (Kaegi, W. E, 1992). Muawiyah bin Abu Sufyan memperkenalkan strategi maritim canggih untuk menghadapi ancaman Kekaisaran Bizantium, yang menguasai Laut Mediterania.

Menyadari potensi dan ancaman yang ditimbulkan oleh armada Bizantium, ia mulai membangun armada laut yang tangguh, menggunakan sumber daya lokal dan mengimpor keahlian dari Bizantium. Salah satu langkah pentingnya adalah merekrut arsitek dan teknisi Bizantium untuk membangun kapal perang, termasuk dromon, serta melatih pelaut Arab dalam keterampilan kelautan. Selain

itu, Muawiyah mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan galangan kapal di pesisir Suriah, seperti di Acre dan Tyre, untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan armada yang siap menghadapi Bizantium (Khairuddin, 2017).

Muawiyah, dengan pengalamannya sebagai gubernur Syam, memahami pentingnya kekuatan laut dalam memperkuat dan melindungi wilayah Islam. Ia fokus pada pembangunan armada laut Umayyah yang tak hanya bertugas mempertahankan pesisir kekhalifahan, tetapi juga melancarkan serangan balasan terhadap Bizantium. Armada ini menjadi elemen vital dalam strategi militer Islam, memberikan keunggulan dalam konflik laut dan memperkuat posisi kekhalifahan di Mediterania (Yatim, 2016). Muawiyah tidak hanya mengamankan jalur perdagangan vital di Mediterania, tetapi juga memperluas pengaruh Islam melalui penaklukan pulau strategis seperti Siprus dan Rhodes. Kebijakan maritimnya mengubah dinamika militer Islam, menjadikannya kekuatan yang dominan di laut dan darat, yang sangat mendukung keberhasilan Dinasti Umayyah di masa depan (Kennedy, H, 2004).

Angkatan laut Umayyah memiliki peran utama dalam melindungi kekhalifahan dari ancaman Bizantium yang dominan di Laut Mediterania. Dengan armada yang kuat dan terorganisir, Dinasti Umayyah tidak hanya mempertahankan pantai-pantai

mereka, tetapi juga melancarkan serangan balik ke wilayah Bizantium. Serangan ini bertujuan untuk menguasai pulau-pulau strategis dan daerah penting, memperkuat posisi kekhalifahan, serta memperluas pengaruh Islam di kawasan Mediterania (Luttwak, E. N., 2009).

Pencapaian terbesar angkatan laut Umayyah terlihat dalam serangkaian pertempuran laut di Mediterania, yang menandai titik balik dalam keseimbangan kekuatan wilayah tersebut. Kemenangan-kemenangan ini memungkinkan Dinasti Umayyah menguasai jalur perdagangan vital, meningkatkan ekonomi, dan memperluas pengaruh ke wilayah baru, termasuk pulau-pulau strategis. Dengan mengendalikan rute perdagangan, Umayyah mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan dominan di Mediterania, sekaligus mempererat interaksi dengan berbagai budaya dan ekonomi di kawasan tersebut (Tahyub, 2004).

Puncak dari operasi angkatan laut oleh Muawiyah bin Abu Sufyan (661-680 M) adalah pengepungan Konstantinopel yang berlangsung antara tahun 674-678 M (Yatim, 2016). Pengepungan Bizantium oleh angkatan laut Umayyah, meskipun tidak berhasil menaklukkan kota tersebut, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam melaksanakan operasi jarak jauh dan memproyeksikan kekuatan ke pusat kekuasaan Bizantium. Operasi ini bukan hanya usaha militer, tetapi juga pernyataan strategis yang menegaskan ambisi

dan kekuatan Dinasti Umayyah dalam menghadapi musuh-musuh besar mereka.

Pengepungan Konstantinopel oleh angkatan laut Umayyah memaksa Bizantium untuk mengalokasikan sumber daya besar untuk pertahanan ibu kota, mengurangi kemampuannya untuk mengancam wilayah Muslim lainnya. Fokus Bizantium pada mempertahankan kota ini menjadi titik balik dalam dinamika kekuatan di Mediterania, menunjukkan pentingnya strategi militer yang komprehensif dalam konflik antar kekuatan besar pada masa itu (Stratos, A. N., 1978).

Keberhasilan angkatan laut Umayyah menguasai Laut Mediterania mengamankan pantai-pantai kekhalifahan dan memperlancar perdagangan maritim, yang meningkatkan kemakmuran ekonomi. Hal ini mendanai operasi militer dan memperkuat stabilitas internal, sekaligus memungkinkan ekspansi wilayah ke pulau-pulau Mediterania dan pantai Afrika Utara (Rahmadi P, 2018). Ekspansi ini tidak hanya menambah wilayah kekhalifahan tetapi juga memberikan basis strategis untuk operasi lebih lanjut dan mengamankan rute perdagangan penting.

Penguatan angkatan laut juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat Muslim. Pembangunan dan pemeliharaan armada yang besar memerlukan pengembangan industri pendukung seperti

galangan kapal, produksi tali, dan pembuatan layar. Ini menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kota-kota pesisir. Selain itu, kebutuhan akan pelaut dan prajurit laut yang terampil mendorong mobilitas sosial dan menciptakan kelas baru dalam masyarakat (Fahmy, A. M, 1966).

## 2. Ekspansi Wilayah Barat dan Timur

Ekspansi wilayah menjadi salah satu ciri khas kebijakan militer Dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dan para penerusnya. Strategi ekspansi ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga untuk mengamankan perbatasan dan sumber daya ekonomi yang penting bagi kestabilan kekhalifahan. Kebijakan ekspansi militer ke Afrika Utara merupakan salah satu prioritas utama Dinasti Umayyah (Amin, 2019). Wilayah ini memiliki nilai strategis yang tinggi, baik dari segi ekonomi maupun militer. Ekspansi ke Afrika Utara dimulai pada masa pemerintahan Muawiyah dan dilanjutkan oleh para penerusnya. Uqba ibn Nafi, seorang jenderal Umayyah, memainkan peran kunci dalam ekspansi ini dengan mendirikan kota Kairouan di Tunisia modern sebagai basis operasi militer dan penyebaran Islam di wilayah tersebut (Amin, 2019).

Strategi ekspansi ke Afrika Utara melibatkan kombinasi kekuatan militer dan diplomasi. Pasukan Umayyah sering kali berhadapan dengan suku-suku Berber yang kuat, dan kebijakan

asimilasi serta aliansi dengan pemimpin lokal menjadi kunci keberhasilan ekspansi ini. Keberhasilan di Afrika Utara membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut ke Semenanjung Iberia, yang dimulai pada tahun 711 M di bawah kepemimpinan Tariq ibn Ziyad (Supriyadi, 2008). Sementara itu, ekspansi ke arah timur, terutama ke wilayah Persia dan sekitarnya, juga menjadi fokus utama kebijakan militer Umayyah. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mengamankan perbatasan timur kekhalifahan. Ekspansi ke timur mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Al-Walid I, dengan pasukan Muslim mencapai perbatasan India dan Asia Tengah (Gibb, H. A. R, 1923).

Untuk mempertahankan wilayah yang telah ditaklukkan, Dinasti Umayyah menerapkan strategi garnisun di perbatasan. Sistem ini, yang dikenal sebagai *ribat* atau *thughur*, melibatkan pembangunan pos-pos militer di sepanjang perbatasan kekhalifahan. Garnisun-garnisun ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan terhadap serangan musuh, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam dan budaya Arab di wilayah-wilayah baru (Tahyub, 2004). Strategi garnisun perbatasan ini terbukti sangat efektif dalam mengamankan wilayah kekhalifahan. Di wilayah timur, garnisun-garnisun ini berperan penting dalam menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden Asia Tengah. Sementara di barat,

mereka menjadi garis depan pertahanan terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Meskipun demikian, kebijakan ekspansi wilayah Dinasti Umayyah secara keseluruhan dapat dianggap berhasil. Dalam waktu kurang dari satu abad, mereka berhasil memperluas wilayah kekhalifahan dari pantai Atlantik di barat hingga perbatasan India di timur. Ekspansi ini tidak hanya mengubah peta geopolitik dunia pada saat itu, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada penyebaran Islam dan budaya Arab di wilayah-wilayah yang ditaklukkan.

### 3. Diplomasi dan Aliansi

Diplomas dan pembentukan aliansi merupakan aspek penting dari kebijakan Dinasti Umayyah dalam menjaga stabilitas kekhalifahan yang luas dan beragam. Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti ini, dikenal sebagai seorang diplomat ulung yang memahami pentingnya negosiasi dan aliansi strategis dalam mempertahankan kekuasaan (Khairuddin, 2017). Penggunaan diplomasi oleh Dinasti Umayyah memiliki dua tujuan utama: menjaga stabilitas internal dan mengelola hubungan dengan kekuatan-kekuatan eksternal. Di dalam kekhalifahan, diplomasi digunakan untuk menengahi konflik antara berbagai faksi dan kelompok etnis. Muawiyah sering kali lebih memilih negosiasi daripada konfrontasi langsung untuk menyelesaikan perselisihan internal, strategi yang terbukti efektif dalam menjaga kohesi kekhalifahan yang baru terbentuk.

Dalam konteks hubungan eksternal, diplomasi Umayyah ditujukan untuk membentuk aliansi yang menguntungkan, mencegah konflik yang tidak perlu, dan memperluas pengaruh Islam tanpa selalu mengandalkan kekuatan militer. Contoh yang terkenal adalah perjanjian damai yang dibuat Muawiyah dengan Kekaisaran Bizantium pada tahun 659 M. Perjanjian ini memungkinkan Dinasti Umayyah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya tanpa ancaman dari musuh utama mereka. Strategi aliansi dengan suku-suku Arab merupakan komponen kunci dari kebijakan Umayyah untuk menjaga stabilitas internal. Muawiyah dan para penerusnya memahami pentingnya dukungan dari suku-suku Arab, terutama dari Suriah dan Irak, untuk mempertahankan legitimasi mereka. Mereka sering memberikan posisi penting dalam pemerintahan dan militer kepada pemimpin suku yang berpengaruh, menciptakan jaringan patronase yang luas (Thaqussy, 2010).

Kebijakan aliansi Umayyah meluas tidak hanya kepada suku Arab, tetapi juga kepada *mawali* (kelompok non-Arab yang baru masuk Islam). Meskipun ada kritik terhadap perlakuan terhadap *mawali*, Umayyah berusaha mengintegrasikan mereka dalam struktur kekhalifahan, terutama di wilayah yang baru ditaklukkan. Di wilayah perbatasan, kebijakan fleksibel diterapkan, dengan

membentuk aliansi dengan pemimpin lokal atau bahkan penguasa non-Muslim untuk menjaga stabilitas dan memfasilitasi penyebaran Islam. Strategi ini efektif, terutama di wilayah seperti Transoxiana dan Sindh, di mana konversi massal ke Islam sering dimulai dengan aliansi politik (Gibb, H. A. R, 1923).

Salah satu contoh paling terkenal dari diplomasi Umayyah adalah perjanjian yang dibuat dengan kerajaan Visigoth di Spanyol sebelum invasi tahun 711 M. Perjanjian ini, yang dibuat dengan salah satu faksi dalam perang saudara Visigoth, memberikan legitimasi dan dukungan lokal untuk ekspansi Muslim ke Semenanjung Iberia (Yatim, 2016). Meskipun demikian, kebijakan diplomasi dan aliansi Umayyah juga menghadapi tantangan. Salah satu kritik utama terhadap dinasti ini adalah kecenderungan mereka untuk mengandalkan dukungan dari kelompok-kelompok Arab tertentu, terutama dari Suriah, yang kadang-kadang menimbulkan kecemburuan di kalangan kelompok-kelompok lain. Ketegangan ini akhirnya berkontribusi pada jatuhnya Dinasti Umayyah (Shaban, M. A, 1971).

Kebijakan aliansi Umayyah dengan elit lokal di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, seperti Khurasan dan Transoxiana, menciptakan struktur kekuasaan yang kompleks dan sulit dikendalikan dari pusat. Pemimpin lokal sering kali memiliki otonomi besar, yang memperburuk tantangan

dalam pengelolaan kekhalifahan. Namun, kebijakan diplomasi dan aliansi strategis Umayyah tetap krusial dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka selama hampir satu abad. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman tentang kompleksitas politik wilayah yang mereka kuasai, serta kesadaran bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk mengelola kekhalifahan yang luas dan beragam (Khairuddin, 2017).

Stabilisasi internal adalah tantangan utama bagi Dinasti Umayyah, mengingat luasnya wilayah yang mencakup berbagai suku, budaya, dan tradisi. Untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah pemberontakan, Muawiyah bin Abu Sufyan dan penerusnya mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada penguatan militer domestik dan rekonsiliasi dengan pemimpin lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketegangan internal dan memastikan kontrol yang stabil atas wilayah yang luas dan beragam tersebut (Watt, 1968). Penguatan militer di wilayah domestik menjadi prioritas utama Dinasti Umayyah untuk mencegah pemberontakan. Dengan menempatkan garnisun militer di daerah strategis dan memperkuat pasukan, dinasti ini bertujuan menciptakan rasa aman bagi rakyat dan menjaga stabilitas kekuasaan politik, yang pada gilirannya membentuk fondasi yang lebih kuat untuk pemerintahan di seluruh wilayah kekhalifahan.

Pembentukan pasukan elit yang dikenal sebagai *shurta* menjadi langkah strategis yang signifikan dalam memperkuat kekuatan militer dan politik Dinasti Umayyah (Yatim, 2016). Pasukan ini berfungsi ganda sebagai pengawal pribadi khalifah dan sebagai pasukan keamanan internal yang bertugas menjaga stabilitas di dalam wilayah kekhalifahan. *Shurta*, yang sebagian besar direkrut dari suku-suku Arab Suriah yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Muawiyah, tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan khalifah. Selain itu, sebagai bagian dari strategi militer dan administrasi, Dinasti Umayyah mendirikan garnisun-garnisun militer yang dikenal dengan istilah *amsar* di berbagai kota strategis seperti Kufa, Basra, dan Fustat (Tahyub, 2004). Garnisun ini tidak hanya berfungsi sebagai pos militer yang menjaga keamanan dan pertahanan di wilayah tersebut, tetapi juga berperan penting sebagai pusat administrasi yang mengatur dan mengawasi kontrol atas wilayah sekitarnya.

Adanya *amsar*, pemerintah Umayyah dapat lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan, mengumpulkan pajak, dan mengelola sumber daya lokal, sehingga memperkuat loyalitas masyarakat terhadap kekhalifahan. Selain itu, Dinasti Umayyah mengembangkan sistem pos yang dikenal sebagai *barid*, yang berfungsi sebagai jaringan komunikasi dan transportasi yang efisien. Sistem ini

memungkinkan pergerakan cepat pasukan dan informasi ke seluruh wilayah kekhalifahan, yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul, termasuk ancaman dari pemberontakan dan serangan musuh. Dengan adanya *barid*, Muawiyah dapat merespons dengan cepat terhadap situasi darurat, memperkuat posisi militer dan politik kekhalifahan, serta mendukung koordinasi antara berbagai unit militer (Hawting, G. R, 2000).

Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan kebijakan rekonsiliasi dengan pemimpin lokal melalui sistem patronase, memberikan jabatan dan hadiah kepada tokoh-tokoh berpengaruh. Strategi ini bertujuan menciptakan loyalitas dan ketergantungan elit lokal, memperkuat stabilitas internal kekhalifahan dan mengurangi potensi ancaman dari pemberontakan (Hawting, G. R, 2000). Selain itu, di beberapa wilayah, terutama yang jauh dari pusat kekuasaan, Muawiyah memberikan tingkat otonomi tertentu kepada pemimpin lokal. Kebijakan ini membantu mengurangi ketegangan dan mencegah pemberontakan terbuka.

Muawiyah bin Abu Sufyan mengintegrasikan elit lokal, termasuk non-Arab, dalam pemerintahan dengan menunjuk mereka sebagai gubernur dan pejabat di wilayah baru. Kebijakan keagamaannya cenderung fleksibel, memberikan toleransi terhadap penganut agama lain, guna menjaga stabilitas dan mendukung

penyebaran Islam di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan (Khayyat, 1995). Muawiyah lebih memilih peran sebagai mediator dalam konflik antar suku atau kelompok, mengutamakan diplomasi daripada kekuatan militer. Pendekatan ini membantu menjaga stabilitas internal, memperkuat citra sebagai pemersatu, dan mengurangi risiko eskalasi konflik.

Kebijakan stabilisasi internal Muawiyah menghadapi kritik, terutama dari kelompok non-Arab dan Syiah yang merasa terpinggirkan oleh dominasi elit Arab. Ketegangan ini, yang berasal dari ketidakpuasan sosial dan politik, turut berkontribusi pada keruntuhan dinasti Umayyah (Shaban, M. A, 1971). Kebijakan kompromi dengan suku-suku besar menciptakan struktur kekuasaan yang sulit dikendalikan, terutama di wilayah seperti Irak dan Khurasan, di mana loyalitas suku lebih kuat daripada loyalitas terhadap kekhalifahan (Crone, P., & Hinds, M, 1986). Kebijakan stabilisasi internal Muawiyah, yang menggabungkan kekuatan militer dan diplomasi, memainkan peran krusial dalam mempertahankan kekuasaan Dinasti Umayyah hampir satu abad dan meninggalkan dampak jangka panjang pada dinamika politik dunia Islam.

### **Kesimpulan/Conclusion**

Kesimpulan dari tulisan ini menganalisis kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam memperkuat armada maritim selama masa pemerintahannya dari tahun 661 hingga 680 M. Temuan

menunjukkan bahwa Muawiyah menerapkan berbagai strategi inovatif, termasuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, perekrutan arsitek dan teknisi Bizantium, serta pelatihan pelaut Arab. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat pertahanan pesisir kekhalifahan Islam, tetapi juga memungkinkan pelaksanaan serangan balasan yang efektif terhadap ancaman Bizantium. Dengan demikian, armada maritim yang dibangun berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengaruh Islam dan menjaga stabilitas politik di dalam negeri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan Muawiyah dalam memperkuat armada maritim memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi di dunia Islam, serta menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan Dinasti Umayyah.

### **Referensi**

- Al-Dzahabi, S. M. *Tārīkh al-Islāmī wa Wafayāt Mashāhīr al-'Ilām* (4th ed.). Dar Kitab Kutub al-'Izzi, 1989.
- Amin, S. M.. *Sejarah Peradaban Islam* (8th ed.). Amza, 2019.
- At-Tabari, I. J. (n.d.). *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* (5th ed.). Dar al-Ma'arif bi Mashr.
- Creswell, J. W, P., C. N. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications, 2018.
- Crone, P., & Hinds, M. *God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam*. Cambridge University Press, 1986.
- Ekaviana, N. A.. Peralihan Kerajaan Islam Secara Damai Dari Hasan bin Ali Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. *Qurthuba: The Journal of*, 2021.

- History and Islamic Civilization*, 5(1), 84-105.  
<https://doi.org/10.15642/qurthub.a.2021.5.1.83-105>
- Fahmy, A. M. *Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean: From the Seventh to the Tenth Century A.D.* National Publication & Printing House, 1966.
- Gibb, H. A. R. *The Arab Conquests in Central Asia*. Royal Asiatic Society, 1923
- HAMZAH, Saidin, et al. Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. *CARITA*, 2023, 129-138.
- Hawting, G. R. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*. Routledge, 2000.
- Hisyam, I. *Sirah al-Nabawiyah li Ibni Hisyam*. Dar Ibnu Hazm, 2009.
- Hitti, P. K. *History of The Arabs* (5th ed.). Macmillan & Co.LTD, 1951.
- Hoyland, R. G. *In God's Path: The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire*. Oxford University Press, 2015.
- Ibn Katsir, I. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (11th ed.). Hajar li al-Taba'ah wa al-Nashr, 1998.
- Kaegi, W. E. *Byzantium and the Early Islamic Conquests*. Cambridge University Press, 1992.
- Kennedy, H. *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century*. Pearson Education, 2004.
- Khairuddin, K. Kebijakan Politik Muawiyah. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2017, 10(1), 161. <https://doi.org/10.24014/af.v10i1.3840>
- Khayyat, A. 'Amr K. ibn. *Ṭarikh Khalīfah ibn Khayyāt*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Luttwak, E. N. *The Grand Strategy of the Byzantine Empire*. Harvard University Press, 2009.
- Malik, M. K. Potret Kekhalifahan Islam Dinamika Kepemimpinan Islam Pasca al-Khulafa' al-Rasyidun hingga Turki Utsmani. *Tsaqafah*, 2017, 13(1), 135. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.980>
- Musthafa, A. K. Studi Kritis Atas Narasi Sejarah Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam Historiografi Islam. *JUSPI Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2021, 4(2), 59. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i2.8253>
- Nashiruddin, A. A. Khalifah Mu'awiyah Bin Abu Sufyan: Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki 661 - 680 M. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 2020, 9(1), 75-84. <https://doi.org/10.17509/factum.v9i1.23085>
- Nur, M. Pemerintahan Islam Masa Daulat Bani Umayyah (Pembentukan, Kemajuan dan Kemunduran). *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 2015 3(1), 111-126. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v3i1.141>
- Rachman, T. Bani Umayyah Dilihat dari Tiga Fase (Fase Terbentuk, Kejayaan dan Kemunduran). *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 2018, 2(1), 86-98. <http://dx.doi.org/10.30829/j.v2i1.1079>
- Rahmadi P, F. Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya).

- Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 2018, 3(2), 669.  
<https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.353>
- Shaban, M. A. *Islamic History: A New Interpretation, Vol. 1, A.D. 600-750 (A.H. 132)*. Cambridge University Press, 1971.
- Sodiqin, A. *Sejarah peradaban Islam: Dari masa klasik hingga modern (Cetakan ketujuh, [edisi kedua])*. LESFI, 2018.
- Stratos, A. N. *Byzantium in the Seventh Century: 642-668*. Adolf M. Hakkert, 1968.
- Supriyadi, D. *Sejarah Peradaban Islam*. Pusaka Setia, 1968.
- Tahyub, S. *Mawsū'ah al-Tārikh al-Islāmī: 'Aṣr al-Umawī*. Dar Usamah Li al-Nash, 2004.
- Thaqussy, M. S. *Daulah Umayyah (7th ed.)*. Dar Al-Nafais, 2010
- Tiqtaqa, M. A. I. *Al-Fakhri fī Ādāb as-Sulṭān wal-Mulūk*. Dar al-Shadir, 1895.
- Tosh, J. *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History (6th ed.)*. Routledge, 2015.
- Watt, W. M. *Islamic Political Thought*. Edinburgh University Press, 1968.
- Yatim, B. *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II (Ed. 1., cet. 27)*. PT RajaGrafindo Persada, 2016.